E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3969-3980
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi

Neng Fuziah[1]*, Yana Fajar FY. Basori[2], Rizki Hegia Sampurna[3]

[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Sukabumi
e-mail: Nengfuziah02@gmail.com[1], yanafajarbasori@ummi.ac.id[2], rizkicdn@ummi.ac.id[3]

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, namun realisasinya di tingkat akar rumput sering kali belum sesuai dengan harapan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan kerangka teori partisipasi Cohen dan Uphoff (2012) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga yang dipilih secara purposif. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), meskipun keterbatasan anggaran membatasi realisasi usulan. Partisipasi pada tahap pelaksanaan tetap terjaga melalui gotong royong, walaupun keterlibatan pihak ketiga pada proyek berskala besar mengurangi keterlibatan langsung masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan jalan dan jembatan serta umumnya turut memeliharanya, sementara partisipasi pada tahap evaluasi masih bersifat reaktif. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat telah terjadi pada setiap tahapan namun belum mencapai tingkat optimal, sehingga diperlukan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih sistematis.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa; Cohen Dan Uphoff; Administrasi Publik.

Abstract

Community participation is a key determinant of successful village development, yet its practical realization at the grassroots level often falls short of normative expectations. This study aimed to describe community participation in village development in Cibitung Village,

Sagaranten District, Sukabumi Regency, using Cohen and Uphoff's (2012) four-stage participation framework: decision making, implementation, benefit, and evaluation. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving the village head, village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and residents selected purposively. Data credibility was established through source, technique, and time triangulation, and data were analyzed using reduction, display, and conclusion drawing. The findings showed that residents were given opportunities to voice aspirations through Hamlet Deliberations (Musdus), Village Deliberations (Musdes), and Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdes), although budget constraints limited the realization of proposals. Implementation participation was sustained mainly through mutual cooperation (gotong royong), though the use of third-party contractors reduced direct involvement in larger projects. Residents benefited substantially from road and bridge construction and generally helped maintain these facilities, while evaluation participation remained largely reactive rather than proactive. Overall, participation occurred at every stage but had not yet reached an optimal level, indicating the need for a more systematic community engagement mechanism.

Keywords : *Community Participation; Village Development; Cohen And Uphoff; Public Administration.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan kemandirian desa (Lailiani, 2017). Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan (Darin et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan desa (Mustanir, 2016). Prinsip ini secara eksplisit diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan (Heri, 2024).

Secara teoretis, Cohen dan Uphoff dalam Aji et al. (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diamati melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), pelaksanaan (*implementation*), pemanfaatan hasil (*benefit*), dan evaluasi (*evaluation*) (Aji et al., 2022). Keempat tahapan tersebut merupakan satu kesatuan siklus yang menentukan sejauh mana pembangunan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sejalan dengan itu, Arnstein (1969) melalui konsep *A Ladder of Citizen Participation* menegaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari partisipasi semu (*tokenism*) hingga partisipasi yang benar-benar memberikan kekuasaan kepada warga (*citizen power*) (Syamsudin, 2019). Semakin tinggi tingkat partisipasi suatu masyarakat, semakin besar pula peran mereka dalam menentukan

arah pembangunan wilayahnya sendiri (Siregar, 2020). Dalam perspektif administrasi publik, pergeseran paradigma dari pendekatan birokratis menuju pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif pembangunan dan prinsip ini juga menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Noviar & Priyanti, 2023).

Dalam konteks administrasi publik, partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri (Rahma & Niswah, 2020). Siagian dalam Fatmawati et al. (2019) mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan aparatur negara dalam mencapai tujuan negara melalui pelaksanaan kebijakan publik, sebuah definisi yang pada mulanya menekankan peran dominan birokrasi (Fatmawati et al., 2019). Namun, seiring waktu, peran masyarakat semakin diperhitungkan sebagai bagian integral dari proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada level pemerintahan desa yang jarak sosialnya dengan warga relatif dekat (Sante et al., 2023). Kedekatan tersebut semestinya menjadi modal sosial yang memudahkan terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga, bukan sekadar keputusan sepihak dari perangkat desa maupun kelompok elit tertentu di tingkat lokal.

Desa Cibitung, yang berada di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan berbagai program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2027. Program pembangunan tersebut tersebar pada empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki jumlah program terbanyak. Pemerintah Desa Cibitung juga telah menyelenggarakan forum-forum musyawarah sebagai wadah partisipasi, di antaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri 42 peserta dan Musyawarah Desa (Musdes) Pengesahan Perubahan RPJMDesa yang dihadiri 34 peserta dari unsur pemerintah desa, BPD, RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan tokoh masyarakat. Meskipun forum-forum tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi yang telah dibuka oleh pemerintah desa, kehadiran dalam forum musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan kedalaman partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana partisipasi tersebut terwujud pada seluruh tahapan pembangunan, bukan sekadar dihitung dari jumlah kehadiran semata.

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa topik partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang. Setiawan et al. (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting bagi pembangunan desa berkelanjutan, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya keterlibatan warga dan dominasi elit lokal (Setiawan et al., 2020). Agustin (2016) menegaskan bahwa manajemen partisipatif mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Agustin, 2016), sedangkan Yustianto (2025) lebih menyoroti peran regulasi dan strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga melalui musyawarah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Yustiyanto, 2025).

Penelitian Silalah (2023) memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kepemimpinan desa (Silalah, 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada satu aspek partisipasi saja, seperti perencanaan atau pemberdayaan, dan belum secara komprehensif mengkaji keempat tahapan partisipasi sebagaimana dirumuskan oleh Cohen dan Uphoff secara utuh dalam satu lokus penelitian.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam kajian ini. Dwiyanto dalam Rahman (2015) menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh terbatasnya akses informasi, kurangnya transparansi, dan rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan (Rahman, 2015). Heri (2024) menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah desa menjadi faktor pendorong utama yang menentukan seberapa besar masyarakat bersedia terlibat (Heri, 2024). Selain faktor tersebut, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta ada tidaknya ruang partisipasi yang benar-benar disediakan turut menentukan intensitas keterlibatan warga pada setiap tahap pembangunan. Apabila faktor-faktor pendorong tersebut tidak terpenuhi secara memadai, maka partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas semata, sekadar hadir tanpa memberikan kontribusi substantif terhadap arah kebijakan pembangunan desa.

Konteks empiris di Desa Cibitung memperlihatkan bahwa meskipun forum-forum musyawarah telah rutin diselenggarakan, keberhasilan pembangunan desa tidak semata bergantung pada terselenggaranya forum tersebut, melainkan juga pada sejauh mana aspirasi yang disampaikan benar-benar memengaruhi keputusan akhir, seberapa aktif warga terlibat pada tahap pelaksanaan di luar forum resmi, sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara secara swadaya, serta sejauh mana masyarakat memiliki keberanian dan ruang untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah berjalan. Fenomena inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, mengingat kesenjangan antara konsep partisipasi yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan pembuktian empiris yang sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa di Desa Cibitung, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut secara lebih mendalam. Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bentuk, kualitas, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik mengenai partisipasi masyarakat berbasis teori Cohen dan Uphoff, sekaligus memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Desa Cibitung, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih partisipatif, efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Secara akademis, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji partisipasi masyarakat di

wilayah perdesaan dengan karakteristik sosial dan geografis yang serupa dengan Desa Cibitung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan tanpa bermaksud menguji hipotesis (Muslimin et al., 2024). Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa di Desa Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Sasaran penelitian adalah masyarakat Desa Cibitung sebagai subjek utama pembangunan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembangunan, yaitu Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan, serta data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan pembangunan desa, notulen musyawarah, dan dokumen RPJMDesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, wawancara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, dan studi dokumentasi (Nugraha, 2025). Penentuan informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Informan	Jumlah	Kriteria	Keterangan
1	Kepala Desa	1 orang	Mengetahui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa	Informan kunci
2	Perangkat Desa	2-3 orang	Terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	Informan pendukung
3	Anggota BPD	2 orang	Mengetahui proses musyawarah dan aspirasi masyarakat	Informan pendukung
4	Tokoh Masyarakat	2 orang	Memiliki pengaruh dan mengetahui kondisi sosial masyarakat	Informan pendukung
5	Masyarakat Desa	4-6 orang	Terlibat atau mengetahui kegiatan pembangunan desa	Informan utama

Sumber: diolah dari data penelitian (2026).

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pengambilan data yang berbeda (Amelia et al.,

2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga; triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara terhadap temuan observasi lapangan dan dokumen resmi desa; sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada kesempatan dan waktu yang berbeda-beda, termasuk saat kegiatan musyawarah dan aktivitas pembangunan berlangsung, guna menghindari bias situasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana diadaptasi oleh Sugiyono (2020), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara bertahap selama penelitian berlangsung, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Azhari et al., 2023). Reduksi data dilakukan dengan memilah data mentah hasil wawancara dan observasi agar tetap fokus pada empat tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus mencocokkan temuan baru terhadap temuan sebelumnya hingga diperoleh pola yang konsisten. Penelitian dilaksanakan di Desa Cibitung selama kurang lebih sembilan bulan, dari Oktober 2025 hingga Juni 2026, meliputi tahap persiapan penelitian, pengurusan izin, observasi awal, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Cibitung telah terlaksana pada empat tahapan sesuai kerangka Cohen dan Uphoff, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, meskipun dengan kualitas keterlibatan yang berbeda-beda pada setiap tahapan. Gambaran umum sebaran program pembangunan yang menjadi konteks partisipasi tersebut disajikan pada Gambar 1, yang memperlihatkan bahwa bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki jumlah program terbanyak, yaitu 15 program, diikuti pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 10 program, penyelenggaraan pemerintahan desa 8 program, dan pembinaan kemasyarakatan 6 program dari total keseluruhan program dalam RPJMDesa Tahun 2020-2027.

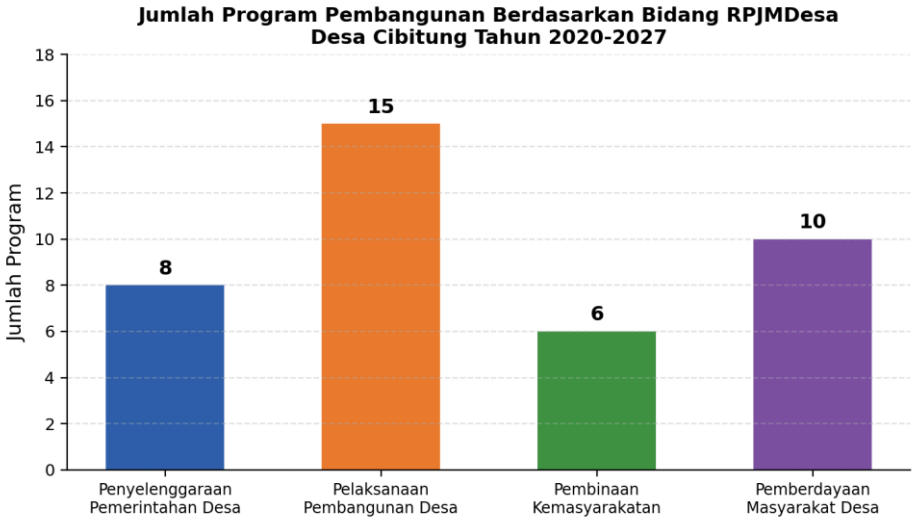

Gambar 1. Jumlah Program Pembangunan Berdasarkan Bidang RPJMDesa Desa Cibitung Tahun 2020-2027

Pada tahap pengambilan keputusan, hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga menunjukkan kesamaan informasi bahwa perencanaan pembangunan diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) di tiap dusun, dilanjutkan pembahasan bersama BPD dan perangkat desa, kemudian diinput sebagai usulan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebagaimana disampaikan Kepala Desa, perencanaan dimulai dari Musdus di setiap dusun sebelum hasilnya dibahas bersama BPD, sekretaris desa, dan perangkat desa untuk diinput sebagai usulan pembangunan ke tingkat kecamatan. Temuan ini sejalan dengan konsep partisipasi Cohen dan Uphoff yang menempatkan keterlibatan masyarakat dalam *decision making* sebagai tahap awal yang menentukan arah pembangunan. Namun demikian, tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan desa memaksa pemerintah desa menetapkan skala prioritas, dan kehadiran warga dalam forum musyawarah juga belum sepenuhnya merata akibat kesibukan pekerjaan.

Pada tahap pelaksanaan (*implementation*), partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang masih menjadi budaya kuat di Desa Cibitung. Perangkat desa menjelaskan bahwa masyarakat masih kompak dalam pembangunan karena gotong royong masih berjalan dan warga memiliki kesadaran untuk membantu kegiatan pembangunan desa. Bentuk kontribusi masyarakat tidak terbatas pada tenaga fisik, tetapi juga berupa penyediaan konsumsi dan dukungan lain sesuai kemampuan masing-masing. Temuan ini memperkuat gagasan Cohen dan Uphoff bahwa keberhasilan implementasi pembangunan sangat bergantung pada kontribusi nyata masyarakat, sekaligus sejalan dengan penelitian Siregar (2020) yang menegaskan pentingnya masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Meskipun demikian, pada proyek berskala besar yang menggunakan mekanisme pengadaan

pihak ketiga, keterlibatan langsung masyarakat menjadi lebih terbatas, dan perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi sebagian warga (Siregar, 2020).

Pada tahap pemanfaatan hasil (*benefit*), masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari pembangunan jalan, jembatan, dan drainase, terutama pembangunan jembatan penghubung Dusun Mande dan Dusun Cikadu yang mempermudah akses masyarakat, termasuk akses menuju sekolah. Masyarakat juga menunjukkan kepedulian dengan turut menjaga fasilitas umum sebagai aset bersama, meskipun sebagian fasilitas masih memerlukan perhatian lebih dalam pemeliharaannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sapitri et al. (2023) bahwa keberlanjutan manfaat pembangunan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, bukan semata pada selesainya proyek fisik itu sendiri (Sapitri et al., 2023).

Pada tahap evaluasi (*evaluation*), masyarakat diberikan ruang menyampaikan kritik dan saran, misalnya usulan perbaikan drainase agar jalan yang telah diaspal tidak cepat rusak, sebagaimana disampaikan salah satu perangkat desa. Tokoh masyarakat dan warga juga menyampaikan bahwa mereka pernah memberikan kritik dan saran mengenai perencanaan pembangunan dan mendapatkan respons yang cukup baik dari pemerintah desa, meskipun realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pemerintah desa menunjukkan sikap terbuka dengan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi penyusunan program tahun berikutnya. Namun demikian, tidak seluruh warga secara proaktif menyampaikan masukan; sebagian besar baru bersuara ketika menghadapi persoalan yang dirasakan langsung, seperti kerusakan jalan atau drainase yang tidak berfungsi optimal. Ringkasan bentuk partisipasi dan kendala pada setiap tahapan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Bentuk Partisipasi dan Kendala Setiap Tahapan

Tahapan Partisipasi	Bentuk Partisipasi	Kendala Utama
Pengambilan Keputusan	Musdus, Musdes, Musrenbangdes sebagai forum penyampaian aspirasi	Keterbatasan anggaran desa; kehadiran belum merata
Pelaksanaan	Gotong royong, kerja bakti, dukungan tenaga dan konsumsi	Kesibukan warga; sebagian proyek memakai pihak ketiga
Pemanfaatan Hasil	Penggunaan jalan, jembatan, drainase; pemeliharaan swadaya	Kesadaran pemeliharaan belum merata
Evaluasi	Kritik dan saran melalui musyawarah maupun langsung	Bersifat reaktif; belum ada forum evaluasi berkala

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi (2026).

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat teori Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu

sama lain. Temuan ini juga relevan dengan prinsip *good governance*, khususnya aspek partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas (Seran et al., 2025), karena Pemerintah Desa Cibitung telah membuka ruang keterlibatan warga meskipun belum sepenuhnya optimal. Dibandingkan dengan penelitian Sihaloho dkk. (2025) dan Nurhayati, Wijaya, dan Minan (2022) yang lebih menyoroti peran regulasi dan kepemimpinan kepala desa dalam mendorong partisipasi, penelitian ini memperkaya perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Cibitung masih bersifat reaktif pada tahap evaluasi, artinya masyarakat lebih aktif memberi masukan ketika terdapat persoalan yang secara langsung dirasakan, seperti kerusakan infrastruktur, dibandingkan berpartisipasi secara proaktif dalam forum evaluasi terjadwal. Karakteristik reaktif inilah yang menjadi temuan pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus menjadi celah yang perlu diperbaiki melalui penguatan mekanisme evaluasi partisipatif yang lebih sistematis dan berkala oleh pemerintah desa.

Apabila ditinjau dari perspektif Administrasi Publik, keempat temuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Desa Cibitung telah bergeser dari pendekatan birokratis menuju pendekatan yang lebih partisipatif sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (2010) dalam Zahara 2018 (Zahara, 2018), meskipun pergeseran tersebut belum berjalan merata pada seluruh tahapan pembangunan. Pada tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan, peran masyarakat sebagai subjek pembangunan tampak cukup kuat melalui forum musyawarah dan tradisi gotong royong, tetapi pada tahap evaluasi peran tersebut masih menyerupai peran sebagai penerima layanan yang sesekali memberi umpan balik, bukan sebagai mitra yang secara rutin mengawasi jalannya pembangunan. Merujuk pada tangga partisipasi Arnstein, kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Cibitung telah bergerak melewati tahap tokenism menuju tahap kemitraan (*partnership*) pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap tersebut pada aspek pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan.

Faktor keterbatasan anggaran desa, kesibukan pekerjaan warga, penggunaan pihak ketiga pada proyek berskala besar, serta rendahnya keberanian sebagian warga untuk menyampaikan kritik secara terbuka menjadi faktor penghambat yang konsisten ditemukan pada hampir seluruh tahapan partisipasi dalam penelitian ini. Temuan ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan ketersediaan ruang partisipasi yang nyata merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat Desa Cibitung ke depan tidak cukup hanya mengandalkan forum musyawarah formal, tetapi juga memerlukan strategi tambahan, seperti penyediaan papan informasi anggaran desa secara berkala, pembentukan kelompok pemantau pembangunan berbasis dusun, serta pemanfaatan media komunikasi digital untuk menjaring aspirasi dan masukan warga secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Desa Cibitung dan desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Pertama, keberlanjutan tradisi gotong royong perlu terus dijaga sebagai modal sosial utama pembangunan, mengingat kontribusinya yang nyata pada tahap pelaksanaan. Kedua, transparansi pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami keterbatasan fiskal desa dan tidak menaruh kecurigaan terhadap penentuan skala prioritas pembangunan. Ketiga, forum

evaluasi pembangunan yang bersifat berkala dan terjadwal perlu dilembagakan agar partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian rutin dari siklus tata kelola pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Cibitung telah berjalan pada keempat tahapan menurut Cohen dan Uphoff, yaitu pengambilan keputusan melalui Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes; pelaksanaan melalui gotong royong; pemanfaatan hasil berupa penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur; serta evaluasi melalui penyampaian kritik dan saran. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran desa, kesibukan warga, keterlibatan pihak ketiga pada proyek besar, dan sifat evaluasi yang masih reaktif dibandingkan proaktif. Kondisi ini menegaskan bahwa forum musyawarah formal saja belum cukup untuk mewujudkan partisipasi yang berkualitas tanpa disertai transparansi anggaran dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan tersebut, Pemerintah Desa Cibitung disarankan meningkatkan sosialisasi dan transparansi anggaran pembangunan agar masyarakat memahami dasar penetapan prioritas program. Badan Permusyawaratan Desa perlu mengoptimalkan penyerapan dan penyaluran aspirasi warga di tingkat dusun secara lebih menyeluruh. Masyarakat Desa Cibitung diharapkan lebih aktif berpartisipasi pada seluruh tahapan pembangunan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan, serta terus menjaga budaya gotong royong dan kepedulian terhadap fasilitas umum. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian, menambah jumlah informan, serta mengkaji faktor kepemimpinan kepala desa dan pemanfaatan teknologi informasi desa untuk memperkaya pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, *4*(1).

Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(3).

Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitafi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Social Science Research*, *3*(2), 8010–8025. Https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Aspx?Id=853411%0Ahttps://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/1339

Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(1), 11–21.

Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2019). Pembangunan Desa Mandiri Melalui

Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal Of Public Policy And Management*, *1*(1), 15–21.

Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(3), 1376–1388.

Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *3*(2).

Muslimin, D., Alamin, Z., Alizunna, D., Nur Ainia, R., Prakoso, F. A., Missouri, R., Masita, Allo, K. P., Nugraha, D., & Dian, H. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN: PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN CAMPURAN* (T. P. Wahyuni (Ed.); 1st Ed.). CV LAUK PUYU PRESS.

Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, *4*(2).

Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(3), 213–220.

Nugraha, D. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN : TEORI DAN PRAKTIK* (N. Mayasari (Ed.)). Penerbit Widina Media Utama.

Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green And Clean Di Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Publika*, *8*(5).

Rahman, K. (2015). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, *1*(2), 189–199.

Sante, E., Masinambow, V. A. J., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(1), 109–120.

Sapitri, A. D., Priyanti, E., & Kurniansyah, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 4005–4011.

Seran, O. L., Servatius, R., & Niron, E. S. (2025). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka). *Journal Education And Government Wiyata*, *3*(1), 99–121.

Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, *3*(02), 251–270.

Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, *4*(2), 59.

Syamsudin, I. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, *3*(2), 120.

Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, *4*(1), 88–95.

Zahara, E. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, *57*.